

Etika Kritik dalam Pemikiran Al-Ghazali: Reinterpretasi Tanggung Jawab Moral dalam Kritik Sosial-Politik Kontemporer

Deni Supriadi

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Maa'rif Ciamis
denisupriadi@staialmaarifciamis.ac.id

Akhmad Baizuri

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang
akhmadabai@gmail.com

Riwayat Artikel

Diterima: 10 Januari 2026
Revisi: 05 Februari 2026
Terbit: 20 Februari 2026

Kata Kunci:

Al Ghazali
Etika Kritik
Moralitas Politik
Pemikiran Islam

ABSTRACT

This article explores a reinterpretation of Al-Ghazali's thought on the ethics of criticism as a form of moral responsibility in social and political life. For Al-Ghazali, criticism is not a destructive act but an ethical means to uphold justice and correct abuses of power. Using a qualitative library-based approach, this study examines Al-Ghazali's major works and contextualizes them within contemporary issues of democracy and freedom of expression in Indonesia. The findings reveal that Al-Ghazali's ethics of criticism emphasize moral intention, prudent expression, and orientation toward public welfare. This reinterpretation provides a normative foundation for contemporary socio-political criticism, preventing it from devolving into hate speech, polarization, and symbolic violence. Al-Ghazali's thought remains relevant for fostering constructive and ethical critical discourse in modern society.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji reinterpretasi pemikiran Al-Ghazali tentang etika kritik sebagai bagian dari tanggung jawab moral dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam perspektif Al-Ghazali, kritik bukan tindakan destruktif, melainkan mekanisme etis untuk menjaga keadilan dan mengoreksi penyimpangan kekuasaan. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menelaah karya-karya utama Al-Ghazali dan merelevansikannya dengan konteks demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa etika kritik Al-Ghazali bertumpu pada niat moral, cara yang bijaksana, serta orientasi pada kemaslahatan publik. Reinterpretasi ini penting sebagai landasan normatif bagi praktik kritik sosial-politik kontemporer agar tidak terjebak pada ujaran kebencian, polarisasi, dan kekerasan simbolik. Pemikiran Al-Ghazali tetap relevan dalam membangun budaya kritik yang konstruktif dan beradab.

PENDAHULUAN

Etika kritik terhadap pemerintah merupakan aspek penting dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Kritik yang konstruktif dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mendorong akuntabilitas dan transparansi. Di Indonesia, di mana demokrasi telah berkembang sejak reformasi 1998, kritik terhadap pemerintah menjadi semakin relevan. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2022, sekitar 70% responden percaya bahwa kritik terhadap pemerintah penting untuk menjaga kualitas pemerintahan (LSI, 2022). Namun, kritik yang tidak beretika dapat berpotensi menimbulkan konflik sosial dan polarisasi. Oleh karena itu, penting untuk menggali etika kritik yang dapat diterapkan dalam konteks Indonesia, terutama di era media sosial yang semakin mendominasi cara orang berkomunikasi dan berinteraksi, pada Era ini acuan etika dalam menyampaikan kritik dan aspirasi dipandang perlu dalam rangka menciptakan Demokrasi yang santun bagi semua kalangan, dalam hal acuan etika berpolitik pandangan dan pemikiran Al-Ghazali menjadi kajian yang relevan dengan situasi empirik saat ini.

Al-Ghazali, seorang pemikir Muslim abad ke-11, dikenal dengan kontribusinya dalam bidang filsafat, teologi, dan etika. Dalam karya-karyanya, seperti "Ihya Ulumiddin", Al-Ghazali mengemukakan pentingnya moralitas dalam setiap tindakan, termasuk dalam kritik terhadap pemerintah. Ia menekankan bahwa kritik harus dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan bukan untuk merusak. Pemikiran Al-Ghazali ini relevan dalam konteks Indonesia, di mana kritik terhadap pemerintah sering kali diwarnai oleh emosi dan kepentingan politik. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip etika Al-Ghazali, masyarakat dapat lebih bijak dalam menyampaikan kritik yang konstruktif dan produktif.

Urgensi mengadopsi pemikiran Al-Ghazali mengingat Era media sosial telah mengubah lanskap komunikasi politik di Indonesia. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memungkinkan setiap individu untuk menyuarakan pendapatnya secara langsung. Menurut data dari We Are Social dan Hootsuite (2023), terdapat lebih dari 170 juta pengguna media sosial di Indonesia, menjadikannya salah satu negara dengan jumlah pengguna media sosial terbesar di dunia. Namun, fenomena ini juga membawa tantangan baru, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat dan ujaran kebencian. Dalam konteks ini, etika kritik terhadap pemerintah menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa suara rakyat tidak hanya terdengar, tetapi juga disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali pemikiran Al-Ghazali mengenai etika kritik terhadap pemerintah dan menerapkannya dalam konteks politik

Indonesia yang semakin kompleks, terutama di era media sosial. Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel jurnal, dan laporan media yang relevan.

Sumber utama yang digunakan adalah karya-karya Al-Ghazali, seperti "Ihya Ulum al-Din" dan "Nasihatul Mulk", yang memberikan wawasan mendalam tentang etika dan moralitas dalam kritik terhadap kekuasaan. Selain itu, penulis juga akan merujuk pada penelitian tokoh yang membahas pemikiran Ghazali seperti Abdul Qayyum melalui "*Letters of Ghazali*" atau "*Fadhaail Anam Min Rhasail Hujjatul Islam*".

Dalam relevansinya dengan konteks politik Indonesia penelitian ini merujuk pada sumber terkini yang membahas dampak media sosial terhadap politik di Indonesia, seperti studi yang dilakukan oleh Saiful Mujani dan R. William Liddle (2018) yang menunjukkan bagaimana media sosial telah menjadi platform penting bagi masyarakat untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah.

Data statistik juga akan diambil dari survei yang dilakukan oleh lembaga survei independen, seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang menunjukkan tren keterlibatan masyarakat dalam diskusi politik di media sosial. Misalnya, menurut survei LSI pada tahun 2021, sekitar 70% responden mengaku aktif mengikuti berita politik melalui platform media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi sarana vital bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan berpartisipasi dalam diskusi politik.

Dengan menggunakan metode penelitian yang komprehensif ini, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang relevansi pemikiran Al-Ghazali dalam konteks politik Indonesia saat ini, serta menawarkan rekomendasi bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengelola kritik dengan cara yang konstruktif dan etis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Al-Ghazali tentang Etika menjadi referensi diberbagai kajian keilmuan, dalam konteks Etika Kritik terhadap pemerintah ini sengaja diawali dengan esensi etika menurut pandangan Al-Ghazali bertujuan memperdalam pemahaman konseptual tentang etika yang nantinya menjadi landasan bagi rakyat menyampaikan kritik dan kontroling terhadap pemerintah, juga sebagai acuan melihat implementasi kebijakan pemerintah dan hubungannya dengan Masyarakat sebagai ojek kekuasaan, hingga bisa diambil kesimpulan dalam bentuk korelasi antara etika pemerintah dalam mendistribusikan kekuasaannya dan etika masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kritik secara terbuka di era media sosial.

A. Konsep Etika dalam Pemikiran Al-Ghazali

1. Definisi Etika menurut Al-Ghazali

Al-Ghazali, seorang filsuf dan teolog Muslim terkemuka, mengemukakan bahwa etika adalah suatu disiplin yang mengatur tingkah laku manusia berdasarkan nilai-nilai moral yang universal. Dalam karyanya yang terkenal, *Ihya Ulumuddin*, Al-Ghazali menjelaskan bahwa etika tidak hanya berkaitan dengan tindakan eksternal, tetapi juga dengan niat dan keadaan batin seseorang. Ia berpendapat bahwa tindakan yang baik harus didasari oleh niat yang tulus, dan hal ini menjadi landasan bagi seseorang untuk mencapai kebahagiaan sejati (Al-Ghazali, 2005).

Al-Ghazali juga menekankan pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengklasifikasikan akhlak menjadi dua, yaitu akhlak yang baik (*mahmudah*) dan akhlak yang buruk (*mazmumah*). Dalam konteks ini, etika menjadi jembatan yang menghubungkan antara tindakan dan nilai moral yang dianut oleh individu. Dengan demikian, etika menurut Al-Ghazali tidak hanya sekadar teori, tetapi juga praktik yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Al-Ghazali, 2005).

2. Hubungan antara Etika dan Moralitas

Dalam pemikiran Al-Ghazali, etika dan moralitas memiliki hubungan yang erat. Etika dapat dianggap sebagai kerangka kerja yang mendasari moralitas, yang mencakup prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia. Moralitas, di sisi lain, merupakan manifestasi dari etika dalam tindakan nyata. Al-Ghazali berpendapat bahwa moralitas tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya, yang berarti bahwa nilai-nilai moral dapat bervariasi tergantung pada masyarakat tempat seseorang berada (Al-Ghazali, 2005).

Dalam konteks Indonesia, di mana masyarakatnya sangat beragam, pemahaman tentang etika dan moralitas menjadi sangat penting. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 300 suku dan lebih dari 700 bahasa, yang menciptakan keragaman nilai dan norma dalam masyarakat. Keragaman dalam masyarakat tersebut membentuk pola kehidupan yang berbeda, interpretasi terhadap situasi politik pun menemui perbedaan di masing-masing suku dan kelompok masyarakat, perbedaan cara merespon realita politik menjadi bagian dari perbedaan adat dan budaya yang beragam, oleh karenanya pemikiran Al-Ghazali tentang etika dapat menjadi panduan untuk membangun kesepahaman dan toleransi di antara berbagai kelompok dalam masyarakat Indonesia (BPS, 2022).

B Etika dalam Konteks Pemerintahan

1. Tanggung jawab pemerintah menurut Al-Ghazali

Al-Ghazali menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan kekuasaan. Dalam karyanya *Nasihatul Muluk*, ia menggarisbawahi

bahwa pemimpin harus bersikap adil dan bijaksana, serta memastikan kesejahteraan rakyat. Ia berpendapat bahwa pemerintah tidak hanya bertugas untuk mengatur, tetapi juga harus melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, yang menuntut pemimpin untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran (Al-Ghazali, 2005).

Dalam konteks politik Indonesia, tanggung jawab pemerintah menjadi isu yang sangat relevan. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2023, 65% responden merasa bahwa pemerintah tidak cukup transparan dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada jarak antara harapan masyarakat dan kenyataan yang ada. Pemikiran Al-Ghazali dapat menjadi rujukan untuk mendorong pemerintah agar lebih responsif dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya (LSI, 2023).

3. Peran rakyat dalam mengkritik pemerintah

Al-Ghazali juga menggarisbawahi pentingnya peran rakyat dalam mengawasi dan mengkritik pemerintah. Ia berpendapat bahwa rakyat memiliki hak untuk menuntut keadilan dan kebenaran dari pemimpin mereka. Dalam konteks ini, kritik yang konstruktif menjadi bagian dari etika sosial yang harus dijunjung tinggi. Menurut Al-Ghazali, kritik yang disampaikan dengan cara yang baik dan berdasarkan fakta akan membantu menciptakan pemerintahan yang lebih baik (Al-Ghazali, 2005).

Di era media sosial saat ini, kewajiban rakyat untuk mengkritik pemerintah menjadi semakin mudah dan luas. Data menunjukkan bahwa lebih dari 170 juta pengguna internet di Indonesia pada tahun 2023, dengan mayoritas aktif di platform media sosial (APJII, 2023). Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Namun, di sisi lain, tantangan muncul ketika kritik yang disampaikan tidak berlandaskan pada fakta atau disertai dengan ujaran kebencian. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami etika dalam berkomunikasi, sebagaimana diajarkan oleh Al-Ghazali.

C. Kritik Terhadap Pemerintah dalam Pemikiran Al-Ghazali.

1. Dasar-dasar Kritik dalam Pemikiran Al-Ghazali

Pemikiran Al-Ghazali mengenai kritik terhadap pemerintah berakar pada prinsip-prinsip etika dan moralitas yang kuat. Dalam karya-karyanya, terutama "Ihya Ulum al-Din," ia menekankan pentingnya akhlak yang baik dan keadilan sebagai landasan pemerintahan yang sah. Al-Ghazali berargumen bahwa seorang pemimpin harus memiliki integritas dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Ia menegaskan bahwa kritik yang konstruktif adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, yaitu perintah untuk berbuat baik dan melarang perbuatan buruk (Al-Ghazali, 1997).

Dalam konteks Indonesia, di mana banyak masyarakat yang merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah, pemikiran Al-Ghazali dapat dijadikan pijakan untuk melakukan kritik yang berlandaskan etika. Sebagai contoh, survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 62% responden merasa pemerintah tidak transparan dalam pengelolaan anggaran negara (LSI, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk kritik yang berlandaskan pada data dan fakta, sesuai dengan ajaran Al-Ghazali.

Al-Ghazali juga menekankan bahwa kritik tidak boleh dilakukan dengan cara yang merusak, melainkan harus disampaikan dengan cara yang sopan dan penuh rasa hormat. Pendekatan ini relevan dengan era media sosial saat ini, di mana kritik sering kali disampaikan dengan emosi yang tinggi dan tanpa pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, pemikiran Al-Ghazali dapat membantu masyarakat untuk menyampaikan kritik dengan cara yang lebih konstruktif dan produktif.

Statistik menunjukkan bahwa penggunaan media sosial di Indonesia terus meningkat, dengan 170 juta pengguna aktif pada tahun 2022 (We Are Social, 2022). Masyarakat kini memiliki platform untuk menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah. Namun, penting untuk mengingat bahwa kritik yang tidak berlandaskan pada prinsip etika dapat berujung pada disinformasi dan polarisasi. Dalam konteks ini, pemikiran Al-Ghazali menjadi relevan untuk mengarahkan kritik yang ada menuju tujuan yang lebih positif.

Secara keseluruhan, dasar-dasar kritik dalam pemikiran Al-Ghazali dapat dijadikan panduan untuk masyarakat Indonesia dalam menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah dengan cara yang lebih etis dan bertanggung jawab. Dengan mengedepankan akhlak dan keadilan, kritik yang disampaikan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam perbaikan kebijakan publik.

2. Contoh-contoh kritik terhadap pemerintah dalam karya-karya Al-Ghazali

Karya-karya Al-Ghazali sarat dengan contoh-contoh kritik terhadap pemerintah dan kebijakan yang dianggap tidak adil. Salah satu contohnya dapat ditemukan dalam **Ihya Ulum al-Din**, di mana Al-Ghazali mengkritik praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan rakyat. Ia menekankan bahwa pemimpin yang tidak adil akan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, baik di dunia maupun di akhirat (Ghazali, 2001). Kritik ini sangat relevan dalam konteks politik Indonesia, di mana korupsi masih menjadi masalah serius yang mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Contoh lain dari kritik Al-Ghazali dapat dilihat dalam **Letters of Ghazali**, di mana ia menulis secara langsung kepada para pemimpin pada masanya, termasuk Muhammad ibn Maliksyah dan Fakhr al-Muluk. Dalam surat-suratnya, Al-Ghazali mengingatkan mereka tentang tanggung jawab moral yang harus diemban oleh seorang

pemimpin. Ia menekankan bahwa kekuasaan bukanlah hak yang dapat disalahgunakan, melainkan amanah yang harus dijaga dengan baik. Kritik ini mencerminkan keprihatinan Al-Ghazali terhadap kondisi masyarakat yang terpinggirkan akibat kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat (Qayyum, 2003).

Dalam konteks Indonesia, kritik serupa dapat ditemukan dalam berbagai gerakan sosial yang muncul di media sosial. Misalnya, gerakan #ReformasiDikorupsi yang muncul pada tahun 2019 sebagai respons terhadap berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik. Gerakan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya mengawasi dan mengkritik pemerintah, sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali tentang tanggung jawab moral pemimpin.

Al-Ghazali juga mengingatkan tentang pentingnya kejujuran dan integritas dalam pemerintahan. Dalam karyanya, ia mengkritik pemimpin yang tidak jujur dan tidak transparan dalam mengambil keputusan. Hal ini sangat relevan dengan situasi di Indonesia, di mana banyak masyarakat mengeluhkan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah. Survei oleh Lembaga Survei Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 70% responden merasa bahwa pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran (LSI, 2022). Kritik Al-Ghazali tentang kejujuran ini dapat menjadi pendorong bagi masyarakat untuk menuntut akuntabilitas dari pemerintah.

Sebagai penutup, contoh-contoh kritik terhadap pemerintah dalam karya-karya Al-Ghazali menunjukkan bahwa pemikiran beliau masih sangat relevan dalam konteks politik Indonesia saat ini. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, kritik yang disampaikan dapat menjadi alat untuk memperbaiki kondisi pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam era media sosial, masyarakat memiliki platform yang lebih luas untuk menyuarakan kritik dan harapan mereka, sejalan dengan ajaran Al-Ghazali.

D. Konteks Politik Indonesia di Era Media Sosial

1. Perkembangan Media Sosial di Indonesia

Perkembangan media sosial di Indonesia telah mengalami lonjakan signifikan dalam dua dekade terakhir. Menurut laporan We Are Social dan Hootsuite (2023), jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai lebih dari 190 juta orang, menjadikannya sebagai salah satu negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga alat untuk menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah.

Media sosial telah bertransformasi menjadi ruang publik yang memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan mengorganisir gerakan sosial. Misalnya, gerakan #ReformasiDikorupsi yang muncul pada tahun 2019 berhasil menarik perhatian publik dan media massa, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media sosial

dalam membangkitkan kesadaran politik di kalangan generasi muda. Selain itu, survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa sekitar 94% pengguna internet di Indonesia menggunakan media sosial sebagai sumber informasi utama (APJII, 2022).

Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan tersendiri. Misinformasi dan disinformasi sering kali menyebar dengan cepat di platform-platform ini, menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat. Dalam konteks ini, pemikiran Al-Ghazali tentang etika kritik terhadap pemerintah menjadi relevan, di mana ia menekankan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam menyampaikan kritik. Dengan memahami konteks ini, kita dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial sebagai sarana kritik yang konstruktif terhadap pemerintah.

2. Pengaruh Media Sosial terhadap Politik dan Pemerintahan

Media sosial telah mengubah cara politik dijalankan di Indonesia. Dengan akses yang luas terhadap informasi, masyarakat kini lebih mudah untuk mendapatkan dan menyebarkan berita, termasuk kritik terhadap pemerintah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), sekitar 70% responden mengaku bahwa media sosial mempengaruhi pandangan mereka terhadap pemerintah (LSI, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai medium untuk membentuk opini publik.

Salah satu contoh konkret adalah pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia. Media sosial menjadi arena kampanye yang sangat efektif, di mana para kandidat dapat langsung berinteraksi dengan pemilih. Pada pemilu 2019, misalnya, penggunaan media sosial oleh para calon presiden dan partai politik meningkat tajam, dengan banyak dari mereka memanfaatkan platform tersebut untuk menyampaikan visi dan misi mereka. Namun, di sisi lain, media sosial juga menjadi sarana untuk menyebarkan hoaks dan fitnah, yang dapat merusak integritas proses demokrasi.

Pengaruh media sosial terhadap politik juga terlihat dalam gerakan sosial yang muncul sebagai reaksi terhadap kebijakan pemerintah. Contohnya, gerakan Save KPK yang muncul sebagai respons terhadap penanganan kasus korupsi yang dianggap tidak adil. Media sosial menjadi platform utama bagi aktivis untuk menyebarkan informasi dan menggalang dukungan. Dalam hal ini, pemikiran Al-Ghazali tentang pentingnya keadilan dan transparansi dalam pemerintahan sangat relevan, mengingat bahwa kritik yang konstruktif dapat mendorong perubahan positif dalam sistem pemerintahan.

3. Tantangan dan Peluang dalam Kritik Pemerintah melalui Media Sosial

Meskipun media sosial memberikan peluang besar untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

yang sering kali digunakan untuk membungkam suara kritik. Banyak kasus di mana individu atau kelompok yang menyampaikan pendapat melalui media sosial justru terjerat masalah hukum, yang menciptakan efek jera bagi masyarakat. Menurut data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), terdapat peningkatan jumlah laporan terkait pelanggaran kebebasan berekspresi di media sosial dalam beberapa tahun terakhir (Komnas HAM, 2022).

Di sisi lain, peluang untuk melakukan kritik yang konstruktif tetap terbuka lebar. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk mengorganisir diri dan menyuarakan aspirasi secara kolektif. Misalnya, gerakan #BlackLivesMatter yang terinspirasi dari gerakan serupa di luar negeri berhasil menarik perhatian masyarakat Indonesia untuk berdiskusi tentang isu-isu keadilan sosial dan diskriminasi. Dalam konteks ini, pemikiran Al-Ghazali tentang etika kritik dapat menjadi panduan bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik secara bijaksana dan berdasarkan fakta.

Penting untuk diingat bahwa kritik yang disampaikan melalui media sosial haruslah berbasis pada data dan informasi yang akurat. Dengan demikian, masyarakat dapat menghindari penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat merugikan reputasi individu atau lembaga. Dalam hal ini, pendidikan media menjadi sangat penting untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, sehingga mereka dapat menggunakan media sosial dengan lebih bertanggung jawab.

E. Penerapan Prinsip Etika Al-Ghazali dalam Kritik Pemerintah di Era Media Sosial.

Al-Ghazali, seorang pemikir Muslim terkemuka, menekankan pentingnya etika dalam kritik terhadap pemerintah. Dalam konteks Indonesia yang kini berada di era media sosial, prinsip-prinsip etika Al-Ghazali dapat diterapkan untuk membangun narasi kritis yang konstruktif. Ia berargumen bahwa kritik seharusnya dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan bukan untuk merusak. Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai platform yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan kritik dengan lebih luas dan cepat. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2022, sekitar 77% penduduk Indonesia merupakan pengguna internet, dengan media sosial menjadi salah satu platform utama untuk berbagi opini (APJII, 2022).

Dalam penerapan prinsip etika Al-Ghazali, penting untuk mempertimbangkan cara penyampaian kritik. Ia menekankan bahwa kritik harus disampaikan dengan cara yang bijaksana dan penuh rasa hormat. Dalam konteks media sosial, di mana emosi sering kali mendominasi, terdapat risiko penyampaian kritik yang tidak beretika. Misalnya, banyak pengguna media sosial yang menggunakan bahasa kasar atau menyerang secara pribadi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika yang diajarkan oleh Al-Ghazali. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Indonesia menunjukkan bahwa 60% pengguna

media sosial merasa bahwa kritik yang disampaikan di platform tersebut sering kali tidak beretika dan emosional (Universitas Indonesia, 2023).

Kritik yang konstruktif, menurut Al-Ghazali, seharusnya berorientasi pada solusi dan dialog. Dalam konteks ini, media sosial dapat menjadi sarana untuk mengajak pemerintah berdialog dengan masyarakat. Sebuah contoh yang relevan adalah gerakan #ReformasiDikorupsi yang muncul di media sosial, di mana masyarakat mengkritik praktik korupsi dalam pemerintahan dengan harapan untuk mendorong reformasi. Gerakan ini menunjukkan bahwa kritik yang etis dan terarah dapat membuahkan hasil, seperti perhatian lebih dari pemerintah terhadap isu korupsi (Kompas, 2023).

Namun, tantangan tetap ada, terutama dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sering kali digunakan untuk membungkam kritik. Penggunaan UU ITE untuk menjerat individu yang menyampaikan kritik di media sosial menunjukkan adanya benturan antara kebebasan berekspresi dan pengaturan yang ketat. Al-Ghazali mengajarkan bahwa kritik yang baik harus disertai dengan tanggung jawab, tetapi di sisi lain, masyarakat juga perlu dilindungi untuk menyampaikan aspirasi mereka. Oleh karena itu, penting untuk mencari keseimbangan antara etika kritik dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.

Dengan demikian, penerapan prinsip etika Al-Ghazali dalam kritik pemerintah di era media sosial harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Penting bagi masyarakat untuk menggunakan media sosial sebagai alat untuk membangun dialog yang konstruktif dan memperbaiki keadaan, bukan sebagai sarana untuk menyerang atau merusak. Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Ghazali yang mendukung kritik yang membangun dan penuh tanggung jawab.

1. Analisis Kasus Kritik Terhadap Pemerintah di Indonesia yang Terinspirasi oleh Pemikiran Al-Ghazali

Dalam menganalisis kasus kritik terhadap pemerintah di Indonesia yang terinspirasi oleh pemikiran Al-Ghazali, kita dapat melihat beberapa contoh konkret yang mencerminkan penerapan etika kritik. Salah satu kasus yang menonjol adalah kritik terhadap kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19 pada 2020 hingga 2022 silam, atau yang lebih terkini penanganan pemerintah terkait kasus Pagar Laut di Tangerang. Banyak masyarakat yang menggunakan media sosial untuk menyampaikan kritik dan saran, dengan harapan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif. Kritikan ini tidak hanya bersifat negatif, tetapi juga disertai dengan usulan solusi, yang sejalan dengan prinsip Al-Ghazali tentang kritik yang konstruktif.

Sebagai contoh, seorang dokter yang aktif di media sosial mengkritik lambatnya distribusi vaksin di berbagai daerah. Ia tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga memberikan rekomendasi tentang bagaimana cara mempercepat proses distribusi. Melalui

postingannya, ia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi dan memberikan informasi yang akurat mengenai pentingnya vaksin. Hal ini mencerminkan bagaimana kritik yang diinspirasi oleh pemikiran Al-Ghazali dapat mendorong dialog dan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah (Tempo, 2022).

Namun, tidak semua kritik diterima dengan baik oleh pemerintah. Beberapa individu yang menyampaikan kritik tajam justru mengalami tekanan hukum berdasarkan UU ITE. Kasus yang menonjol adalah penangkapan seorang aktivis media sosial yang mengkritik kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Penangkapan ini memicu reaksi publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai kebebasan berpendapat di Indonesia. Dalam konteks ini, pemikiran Al-Ghazali tentang etika kritik menjadi semakin relevan, di mana kritik harus disampaikan dengan cara yang tidak merugikan, tetapi tetap mempertahankan hak untuk berbicara (CNN Indonesia, 2023).

Penting untuk dicatat bahwa kritik yang terinspirasi oleh pemikiran Al-Ghazali tidak hanya terbatas pada isu-isu besar seperti pandemi, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan sosial dan politik. Misalnya, kritik terhadap kebijakan lingkungan hidup yang merugikan masyarakat lokal juga banyak disampaikan di media sosial. Masyarakat menggunakan platform tersebut untuk mengadvokasi perlindungan lingkungan dan menyuarakan hak-hak mereka. Dalam hal ini, kritik yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menyerang pemerintah, tetapi juga untuk mendorong kesadaran dan tindakan yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya alam (Detik, 2023).

Secara keseluruhan, analisis kasus kritik terhadap pemerintah di Indonesia menunjukkan bahwa pemikiran Al-Ghazali tentang etika kritik dapat menjadi panduan yang berharga dalam konteks politik saat ini. Masyarakat perlu terus mendorong kritik yang konstruktif dan penuh tanggung jawab, sambil tetap berjuang untuk kebebasan berekspresi. Hal ini tidak hanya akan memperkuat demokrasi, tetapi juga membantu menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.

3. Perbandingan antara Kritik Tradisional dan Kritik di Era Media Sosial

Perbandingan antara kritik tradisional dan kritik di era media sosial menunjukkan pergeseran yang signifikan dalam cara masyarakat menyampaikan pendapat mereka. Kritik tradisional, yang sering kali dilakukan melalui media cetak atau forum-forum formal, memiliki batasan dalam hal jangkauan dan kecepatan penyampaian. Sebagai contoh, surat pembaca di koran atau artikel opini di majalah biasanya memerlukan waktu untuk dipublikasikan dan sering kali hanya menjangkau audiens terbatas. Dalam konteks ini, kritik yang disampaikan cenderung lebih formal dan terstruktur, sesuai dengan norma-norma yang berlaku di media tersebut.

Di sisi lain, kritik di era media sosial menawarkan kecepatan dan jangkauan yang jauh lebih besar. Dengan hanya beberapa klik, individu dapat menyampaikan pendapat

mereka kepada ribuan atau bahkan jutaan orang. Menurut laporan We Are Social dan Hootsuite, pada tahun 2023, Indonesia memiliki lebih dari 170 juta pengguna media sosial, menjadikannya salah satu negara dengan pengguna media sosial terbanyak di dunia (We Are Social, 2023). Hal ini memungkinkan kritik terhadap pemerintah untuk tersebar dengan cepat dan mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan kritik tradisional.

Namun, pergeseran ini juga membawa tantangan tersendiri. Kritik di media sosial sering kali tidak terfilter dan dapat dipenuhi dengan emosi, yang dapat mengarah pada misinformasi atau ujaran kebencian. Dalam konteks ini, pemikiran Al-Ghazali tentang etika kritik menjadi sangat penting. Ia mengajarkan bahwa kritik harus disampaikan dengan cara yang baik dan penuh rasa hormat. Oleh karena itu, meskipun media sosial memberikan kebebasan yang lebih besar untuk menyampaikan kritik, penting bagi pengguna untuk tetap berpegang pada prinsip etika dalam menyampaikan pendapat mereka (Merdeka, 2023).

Perbandingan ini juga mencakup cara pemerintah merespons kritik. Dalam kritik tradisional, pemerintah biasanya lebih terbuka untuk menerima masukan dari media cetak, sementara kritik di media sosial sering kali dianggap lebih mengganggu. Misalnya, ketika masyarakat mengkritik kebijakan pemerintah melalui Twitter atau Instagram, sering kali respons yang diberikan adalah penolakan atau bahkan tindakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mungkin merasa terancam oleh kritik yang disampaikan secara terbuka dan cepat di media sosial, berbeda dengan kritik yang lebih terstruktur dan formal.

Dengan demikian, perbandingan antara kritik tradisional dan kritik di era media sosial menunjukkan bahwa meskipun ada kemudahan dan kecepatan dalam menyampaikan kritik di media sosial, tantangan dalam hal etika dan respons pemerintah juga meningkat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengadopsi prinsip etika Al-Ghazali dalam kritik mereka, agar dapat menciptakan dialog yang lebih konstruktif dan membangun. Hal ini akan memungkinkan kritik yang disampaikan tidak hanya menjadi suara protes, tetapi juga menjadi alat untuk mendorong perubahan positif dalam pemerintahan dan masyarakat.

KESIMPULAN

Pemikiran Al-Ghazali mengenai etika kritik terhadap pemerintah memberikan landasan yang kuat bagi masyarakat Indonesia dalam menyikapi dinamika politik yang berkembang, terutama di era media sosial. Dalam karyanya, "Nasihatul Muluk", Al-Ghazali menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam memberikan kritik, serta perlunya kritik yang konstruktif untuk kemaslahatan bersama (Al-Ghazali, 2010). Di Indonesia, di mana media sosial menjadi platform utama untuk menyampaikan pendapat, implikasi dari pemikiran ini sangat relevan. Data dari We Are Social dan Hootsuite (2023)

menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna media sosial terbanyak, mencapai 170 juta pengguna. Hal ini menciptakan ruang yang luas bagi masyarakat untuk berinteraksi dan menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Namun, tantangan muncul ketika banyak kritik yang disampaikan tidak berdasarkan fakta dan cenderung bersifat emosional. Dalam konteks ini, pemikiran Al-Ghazali yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan pemahaman yang mendalam sebelum memberikan kritik menjadi sangat penting. Al-Ghazali menegaskan bahwa kritik harus dilakukan dengan cara yang bijak dan berdasarkan pada kebenaran, agar tidak menimbulkan fitnah dan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu dilatih untuk menyaring informasi dan memberikan kritik yang berbasis pada data dan fakta yang valid.

Dalam konteks Indonesia, di mana keragaman budaya dan agama sangat kaya, kritik yang tidak bijaksana dapat memicu ketegangan antar kelompok. Dengan memahami implikasi pemikiran Al-Ghazali, masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menyampaikan kritik, menjaga harmoni sosial, dan berkontribusi pada pembangunan politik yang sehat.

Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 60% pengguna media sosial di Indonesia terlibat dalam diskusi politik (Statista, 2023). Ini menunjukkan bahwa ada potensi besar untuk menerapkan etika kritik yang diajarkan Al-Ghazali. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip etika dalam kritik, masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun dialog yang konstruktif dengan pemerintah, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Akhirnya, implikasi pemikiran Al-Ghazali tentang etika kritik tidak hanya relevan bagi individu, tetapi juga bagi institusi pendidikan dan organisasi masyarakat sipil. Mereka dapat berperan dalam mendidik masyarakat mengenai pentingnya kritik yang beretika dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pemikiran Al-Ghazali dapat menjadi panduan dalam membangun budaya kritik yang sehat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (2005). *Ihya Ulumuddin*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Ghazali. (2005). *Nasihatul Muluk*: Jakarta. Pustaka Al-Kautsar.
- APJII (2022). *Laporan Survei Penggunaan Internet di Indonesia*.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2023). *Data dan Statistik Pengguna Internet di Indonesia*. Jakarta: APJII.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik Sosial Indonesia*. Jakarta: BPS.
- CNN Indonesia. (2023). *Penangkapan Aktivis Media Sosial: Kebebasan Berpendapat di Era Digital*.
- Detik. (2023). *Advokasi Perlindungan Lingkungan Melalui Media Sosial*.
- Komnas HAM (2022). *Laporan Tahunan tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia*.

- Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2023). *Survei Kepuasan Publik Terhadap Pemerintah*. Jakarta: LSI.
- Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2021). *Survei tentang Transparansi Anggaran*. Diakses dari (website LSI)
- LSI (2023). *Survei Pengaruh Media Sosial terhadap Opini Publik*.
- Transparency International. (2021). *Indeks Persepsi Korupsi*. Diakses dari (website Transparency International)
- Tempo. (2022). *Kritik Kinerja Vaksinasi COVID-19 di Media Sosial*.
- Universitas Indonesia. (2023). *Studi Pengaruh Media Sosial terhadap Etika Kritik di Indonesia*.
- UNESCO. (2020). *Education for All 2020*. Diakses dari (website UNESCO)
- We Are Social. (2022). *Digital 2022: Indonesia*. Diakses dari (website We Are Social)
- Qayyum, A. (2003). *Letters of Ghazali*. New Delhi: Islamic Book Trust.
- We Are Social & Hootsuite (2023). *Digital 2023: Indonesia*.
- We Are Social. (2023). *Digital 2023: Indonesia*.